

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat yang penting dalam rangka agenda reformasi nasional. Didalamnya tercakup beberapa agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, dari mulai tingkat pusat hingga pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang dasar 1945 sampai tingkat peraturan desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berfikir, dan berbagai perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah daerah saat ini telah dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal maupun segi eksternal. Dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik untuk menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini, maka membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri serta dapat mengoptimalkan

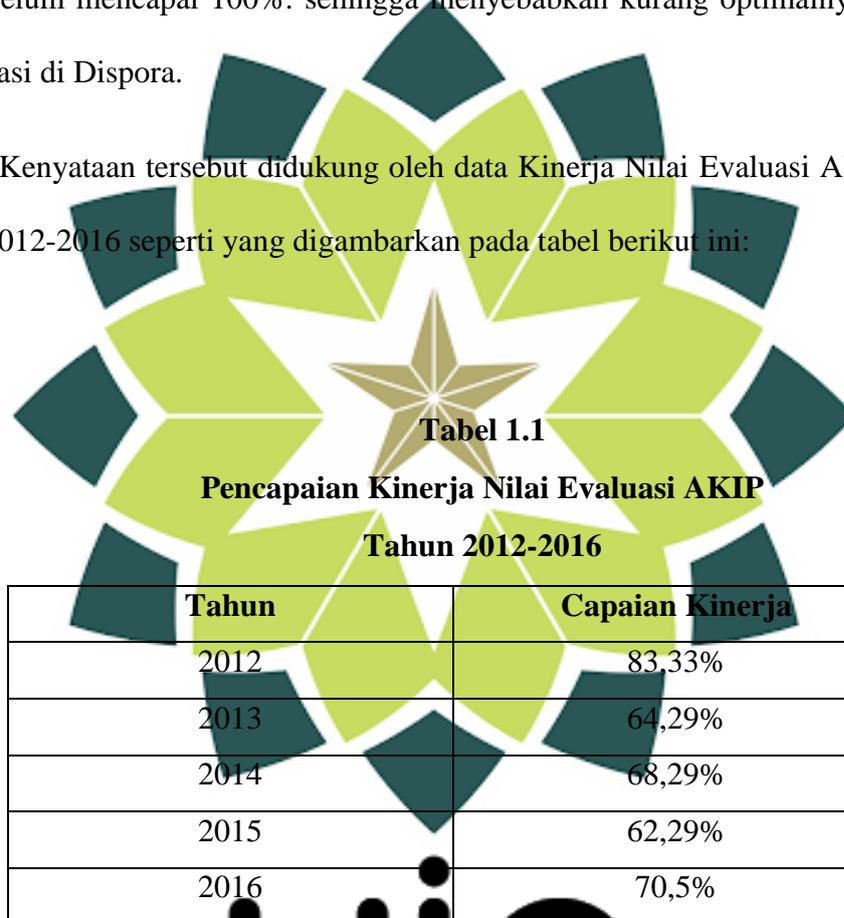
apa yang dimilikinya dan mampu meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta dapat mengacu pada semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi satu jua.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam suatu organisasi pemerintahan.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung adalah salah satu organisasi pemerintahan di lingkungan Kota Bandung yang merupakan lembaga teknis daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengelola dan sekaligus membantu Walikota dalam bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam kinerja organisasinya masih dikatakan kurang optimal. Kinerja organisasi merupakan gambaran seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokoknya sehingga mencapai visi dan misi institusi. Berdasarkan

observasi awal ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masih kurang optimalnya kinerja organisasi dengan dimensi hasil yaitu capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) selama lima tahun belum mencapai 100%. sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja organisasi di Dispora.

Kenyataan tersebut didukung oleh data Kinerja Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2012-2016 seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini:



(Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2012-2016)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa total pencapaian Indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2012-2016 selama lima tahun belum mencapai 100%. Pada tahun 2012 realisasi capaian kinerja mencapai 83,33%, lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 64,29%, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali

menjadi sebesar 68,29%, sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 62,29%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 70,5%.

Berdasarkan hal tersebut bahwa kurang optimalnya kinerja organisasi ditunjukkan dengan melihat dari segi sarana prasarana, dimana sarana prasana ini menjadi faktor utama dalam sebuah peningkatan kinerja. Bangunan gedung yang ditempati bukan milik Dispora sendiri, melainkan milik instansi lain. Bangunan ini sudah cukup lama berdiri dan kondisinya pun kurang memadai sehingga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dimana saat musim penghujan tiba, air hujan bisa masuk ke dalam ruangan. Begitupun beberapa atap gedung terlihat berlubang, sehingga saat sedang berlangsungnya proses kinerja yang dikejar *deadline* banyak kegiatan yang tidak tercapai tepat waktu karena kondisi kantor yang tidak memadai. Kemudian berkaitan dengan koordinasi antar bidang yang menyebabkan kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang-bidang selalu bersamaan dengan bidang yang lain. Sehingga banyak kegiatan yang terabaikan dan tidak terlaksana. Contohnya yaitu dalam kegiatan sosialisasi tentang keolahragaan dengan kegiatan pelatihan pelatih. Walaupun kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatannya pun tidak akan maksimal karena setiap karyawan yang bersangkutan terbagi fokusnya.

Berkaitan penjelasan diatas bahwa kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung masih kurang optimal diduga dipengaruhi oleh kurang terserapnya belanja modal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak para PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) tidak mengetahui atau tidak mengindahkan kartu kendali, sehingga masih banyak pengajuan yang melebihi pagu anggarannya.

Hal ini bisa menjadi penghambat dalam realisasi anggaran. Dari segi penganggaran kas anggaran, terkadang disini para PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) tidak merencanakan kegiatan secara matang, sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kas anggarannya. Ada yang melebihi kas anggaran dan ada juga yang sangat kurang terserapnya anggaran pada kas anggaran tersebut. Salah satu anggaran yang tidak terserap yaitu dalam Belanja Modal, dimana realisasi belanja modalnya tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan. Akibatnya dari kurangnya serapan belanja modal ini penganggaran untuk belanja modal di minimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa program Dispora masih ada yang belum terlaksana.

Adapun data anggaran belanja modal dari tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun
2012 – 2017

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	+/-
1.	2012	3.699.882.000	3.530.148.600	97,7%	(79.733.372)
2.	2013	6.190.567.200	4.790.272.440	77,50	(1.390.294.806)
3.	2014	80.029.655.003	7.456.170.700	9,31	(72.573.484.303)
4.	2015	81.362.912.504	51.871.768.375	63,75	(29.491.144.126)
5.	2016	54.650.346.000	46.912.811.574	85,84	(7.737.534.426)
6.	2017	471.081.930	237.798,000	50,4	(233.283.930)

*(Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Bandung Tahun 2012-2017)*

Pada tahun 2012 anggaran untuk belanja modal pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dianggarkan sebesar Rp. 3.609.882.036,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.530.148.664,00 atau 97,7% kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp. (79.733.372) sedangkan pada tahun 2013 Tingkat penyerapan belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 6.180.567.250,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.790.272.444,00 atau mencapai 77,50% kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp. (1.390.294.806,00), lalu pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 80.029.655.003,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.456.170.700,00 atau 9,31% kurang sekali dari target yang dianggarkan sebesar (72.573.484.303,00), lalu pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 81.362.912.504,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 51.871.768.378,00 atau 63,75% kurang dari target yang dianggarkan sebesar (29.491.144.126,00) , lalu pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 54.650.346.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.912.811.574,00 atau 85,84% kurang dari target yang dianggarkan sebesar (7.737.534.426,00). Dan pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 471.081.930 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 237,798,000 atau 50,4% kurang dari target yang dianggarkan sebesar (233.283.930). Anggaran cenderung tidak terealisasi seluruhnya tahunannya (sumber: data laporan keuangan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tahun 2012-2017)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga , Kementrian Negara/Lembaga dituntut secara legal dan formal untuk berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, bahkan

jika tidak terpenuhi maka akan ada konsekuensi logisnya yaitu sanksi. Sanksi jika penyerapan anggaran tidak mencapai persentase yang ditetapkan yaitu 95% adalah pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Dispora sendiri dalam tingkat pencapaian penyerapan anggarannya masih kurang dari 95%.

Berdasarkan uraian di atas meyakinkan penulis untuk menjadikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai lokus penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal dan kinerja organisasi, didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: (1) Capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP selama lima tahun belum mencapai 100% (2) Sarana prasaran Dispora kurang memadai sehingga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi (3) kurangnya koordinasi antar bidang dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan (4) Penyerapan anggaran belanja modal dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi yang mana pada Tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang sangat besar mencapai 68,19% dan pada tahun 2016 ke 2017 mencapai 35,44% dalam penyerapan anggaran modalnya (5) masih kurang terserapnya belanja modal di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung (6) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak merencanakan kegiatan secara matang, sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan anggaran kasnya

Berkenaan dengan hal tersebut meyakinkan penulis untuk dapat memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa penelitian berkenaan dengan pengaruh belanja modal terhadap kinerja organisasi ini sangat menarik untuk

dilakukan dan menjadikan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai lokus penelitian dengan mengacu pada beberapa permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menguji teori yang sudah ada, yaitu berhubungan dengan pengaruh belanja modal terhadap kinerja organisasi. Karena belanja modal merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kinerja organisasi yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja organisasi dengan mengambil judul **“PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintahan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankannya terdapat elemen-elemen yang menentukan baik tidaknya suatu instansi itu yakni elemen sumber daya manusia yaitu pegawai aparatur sipil negara. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut yaitu:

1. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) selama lima tahun belum mencapai 100%.

2. Dalam segi sarana prasarana, bangunan gedung yang ditempati bukan milik sendiri, melainkan milik instansi lain dan kondisinya pun kurang memadai, sehingga berpengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi.
3. Dalam kinerja organisasi Dispora masih kurangnya koordinasi antar bidang dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan.
4. Pada penyerapan anggaran belanja modal tahun 2012 sampai 2017 mengalami fluktuasi yang mana pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang sangat besar mencapai 68,19% dan tahun 2016 ke 2017 mencapai 35,44% dalam penyerapan anggaran belanja modalnya.
5. Pada penganggaran kas anggaran PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan) tidak merencanakan kegiatan secara matang. Sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan anggarannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi yaitu Seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

1. Seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh belanja modal peralatan dan mesin terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh belanja modal gedung dan bangunan terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung?

4. Seberapa besar pengaruh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh belanja modal aset tetap lainnya terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan belanja modal terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal tanah terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal peralatan dan mesin terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal gedung dan bangunan terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal aset tetap lainnya terhadap kinerja organisasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah dalam keilmuan, terutama pada ilmu administrasi publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Selain itu sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kembali kinerjanya agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah terutama dalam penyerapan anggaran belanja modal di masa yang akan datang.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai realitas di luaran daerah terutama pada alokasi belanja modal sebagai komposisi penting dari sebuah lembaga atau organisasi lalu dikaitkan dengan bentuk kinerja organisasi.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini, penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya sehingga kajian ilmu yang diteliti bisa lebih kaya dan luas lagi.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang syarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman penelitian berkaitan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang keuangan daerah atau akuntansi sektor publik

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2006:23) menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Dalam konteks administrasi publik ini, pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negara melalui kekuasaan tersebut.

Lalu arti dari Administrasi Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan pajak, serta mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah.

Di Indonesia bentuk pelayanan yang maksimal dan optimal dari pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban itu dibutuhkannya manajemen sumber daya manusia yang baik. Menurut Hasibuan (2012:10) mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi, karena suatu aktifitas organisasi, dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan suatu kinerja yang berkualitas.

Kinerja organisasi menurut Badan Sobandi (2006:176) merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *Input, Output, Outcome, Benefit maupun Impact*. Hasil kerja yang dicapai

oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, yang terkait dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Kinerja organisasi dari teori yang digunakan yaitu teori Baban Sobandi dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, berikut adalah dimensi kinerja organisasi menurut Baban Sobandi (2006:179) yaitu sebagai berikut:

1. Keluaran
2. Hasil
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4. Informasi penjelas

Pertama, keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang mana berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. *Kedua*, hasil adalah pengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan. *Segala* sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. *Ketiga*, kaitan usaha dengan pencapaian adalah kurang efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. *Keempat*, informasi penjelas ini sangat penting untuk menjelaskan

kinerja organisasi yang membantu penggunaan untuk memahami ukuran kinerja yang akan dilaporkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu belanja operasional dan belanja modal. Salah satu belanja yang dimaksud yaitu belanja modal dalam kategori belanja rutin pemerintah. Menurut Baldric Siregar belanja modal adalah pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeliatan untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap.

Menurut Baldric Siregar dimensi belanja modal meliputi:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
5. Belanja modal aset tetap lainnya

Menurut Halim (2009:12) Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.

Kedua konsep diatas merupakan paradigma penelitian yang dijadikan alasan dalam penelitian ini, yaitu: jika penyerapan anggaran belanja modal baik maka akan

semakin optimal kinerja organisasi. Berdasarkan uraian diatas untuk menyederhanakan model penelitian yang peneliti sajikan dalam gambar sebagai berikut:



uin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Oleh karena itu hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat pernyataan (declarative) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu atau lebih variabel dengan variabel lain. Menurut Sugiyono (2016:70) mengatakan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif”.

Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sugiyono (2016:77)

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis asosiatif sebagai berikut:

1) Secara Parsial

a. H_0 : Tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

H_a : Tanah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

b. H_0 : Peralatan dan Mesin tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

H_a : Peralatan dan Mesin berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

c. H_0 : Gedung dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

H_a : Gedung dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

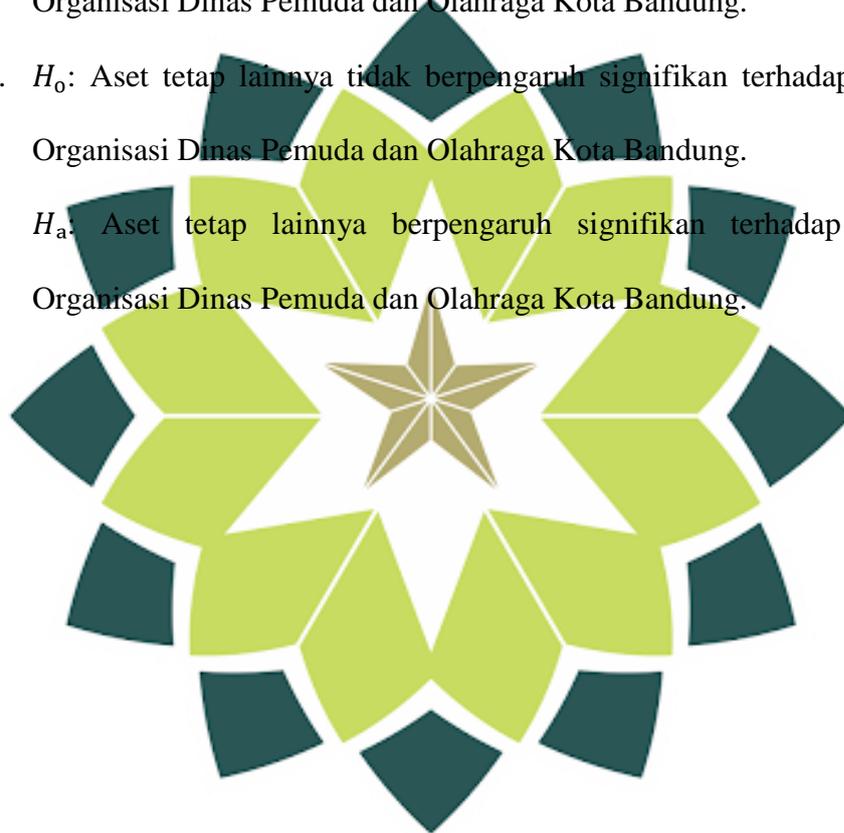


d. H_0 : Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

H_a : Jalan, Irigasi dan Jaringan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

e. H_0 : Aset tetap lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

H_a : Aset tetap lainnya berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.



uin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**